

Strategi Sosialisasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Muslim di Kota Magelang pada Pilkada 2024: Studi Perspektif Budaya Politik Islam

Tafrika Donita, Martien Herna Susanti
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: tafrikad@students.unnes.ac.id

Abstract

This research investigates the strategy of the General Election Commission (KPU) of Magelang City in enhancing political participation among Muslim communities during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The phenomenon observed reveals a growing concern regarding the declining political engagement, particularly among young Muslim voters, in an era dominated by digital communication and apathy. The study aims to analyze how the KPU formulates and implements socialization strategies aligned with Islamic political culture, which includes Islamic values as sources of ethics, democracy as a political framework, and both cultural and institutional factors. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, documentation, and observation. Analysis was carried out using the Miles and Huberman model and triangulation for data validation. The findings reveal that KPU Magelang applied a segmented and integrative communication strategy digital, participative, and conventional tailored to different voter age groups. Notably, the incorporation of religious and ethical messaging, community-based education, and collaboration with youth organizations significantly contributed to increased participation, with turnout reaching 79.16% in 2024. This study underscores the relevance of contextualized Islamic political culture in fostering democratic engagement within Muslim-majority regions.

Keywords: *Islamic political culture, electoral participation, KPU strategy*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Muslim pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kekhawatiran terhadap menurunnya keterlibatan politik, khususnya di kalangan pemilih muda Muslim, di tengah dominasi budaya digital dan meningkatnya apatisisme politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana KPU merancang dan menerapkan strategi sosialisasi yang sejalan dengan budaya politik Islam, yang mencakup Islam sebagai sumber nilai etika, demokrasi sebagai wadah politik, serta pendekatan kultural dan institusional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta triangulasi untuk validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi komunikasi yang tersegmentasi dan integratif menggabungkan pendekatan digital, partisipatif, dan konvensional yang disesuaikan dengan kelompok usia pemilih. Pendekatan yang mengedepankan pesan moral keagamaan, pendidikan berbasis komunitas, serta pelibatan organisasi kepemudaan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih, yang mencapai angka 79,16% pada tahun 2024. Temuan ini menegaskan pentingnya budaya politik Islam yang kontekstual dalam mendorong keterlibatan demokratis di wilayah mayoritas Muslim.

Kata Kunci: Budaya Politik Islam, Partisipasi Pemilu, Strategi KPU

A. Pendahuluan

Pemilih dari berbagai kelompok usia; muda, dewasa, hingga lanjut usia, merupakan elemen penting dalam struktur demografis pemilu, termasuk di Kota Magelang. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa 65,2% dari 128.590 penduduk Kota Magelang berada pada kelompok usia produktif (15–59 tahun). Komposisi ini memperlihatkan besarnya potensi partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya dari kelompok usia muda yang jumlahnya terus bertambah dan memiliki potensi signifikan dalam menentukan hasil pemilihan.¹ Namun demikian, kelompok usia dewasa dan lanjut usia tetap menjadi penentu penting karena tingkat partisipasi mereka cenderung stabil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemilih usia dewasa dan lansia memiliki kesadaran politik yang tinggi, didukung oleh pengalaman panjang dalam mengikuti proses demokrasi serta kemampuan mengevaluasi rekam jejak kandidat secara lebih rasional.²

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai pilar demokrasi lokal berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung, sehingga partisipasi pemilih menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam kerangka ini, pendidikan politik dan sosialisasi pemilu harus disesuaikan dengan karakteristik tiap kelompok pemilih. KPUD, sesuai mandat undang-undang, bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk melalui program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Namun, tantangan partisipasi masih terlihat, terutama di kalangan pemilih muda. Berbagai studi menunjukkan kecenderungan apatisme, keterbatasan pengalaman, dan rendahnya literasi demokrasi yang membuat mereka rentan terhadap informasi partisan. Kondisi ini menjadi perhatian KPU Kota Magelang dalam merancang strategi sosialisasi yang mampu menjangkau seluruh segmen pemilih. Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa pemilih dewasa dan lanjut usia umumnya memiliki kesadaran politik lebih tinggi, didorong oleh pengalaman panjang mengikuti proses demokrasi dan kemampuan mengevaluasi rekam jejak kandidat secara lebih kritis dan rasional.

Pemilihan umum memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.³ Penelitian yang dilaksanakan oleh Zakaria & Rachmat menunjukkan bahwa kemajuan kesejahteraan

¹ Databoks, “Mayoritas Penduduk Kota Magelang Pada 2024 Adalah Usia Produktif,” 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0b19469ffb97edc/mayoritas-penduduk-kota-magelang-pada-2024>

² Fitria Barokah et al., “Disrupsi Politik,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022): 1–13,

³ Lestari, et al. “Kepemimpinan Visioner Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah,” *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 26, no. 1 (2023): 19–35,

masyarakat juga memiliki korelasi atau hubungan erat dengan bagaimana masyarakat dikelola oleh pemerintahan⁴, oleh karena itu, pemimpin merupakan sosok sentral yang memberikan dampak sangat besar. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, demokrasi di Indonesia memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung.⁵ Dalam praktiknya, tiga kelompok pemilih utama yang berpartisipasi adalah pemilih pemula, pemilih usia dewasa, dan pemilih lanjut usia. Sistem ini merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

Pilkada sebagai pilar demokrasi lokal berpengaruh langsung pada arah kebijakan publik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung sehingga partisipasi pemilih menjadi indikator penting kualitas demokrasi. Pendidikan politik dan sosialisasi pemilu karenanya perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok pemilih, sementara KPUD bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung LUBER dan JURDIL melalui berbagai program sosialisasi. Tantangan utama masih muncul pada pemilih muda yang cenderung apatis, kurang berpengalaman, dan memiliki literasi demokrasi rendah sehingga lebih rentan terhadap informasi partisan, kondisi yang mendorong KPU Kota Magelang untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif dan inklusif. Sebaliknya, pemilih dewasa dan lanjut usia umumnya menunjukkan kesadaran politik lebih tinggi karena pengalaman panjang mengikuti proses demokrasi serta kemampuan mengevaluasi rekam jejak kandidat secara lebih kritis dan rasional.⁶

Wibawa dan Arisanto mengamati bahwa partisipasi pemuda dalam pemilihan umum masih rendah.⁷ Penelitian lain juga menemukan bahwa individu muda memiliki sikap apatis.⁸ Akar penyebab dari hal-hal tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pengalaman dengan proses demokrasi⁹. Keterbatasan pengalaman politik di kalangan pemilih pemula membuat mereka sering kali mudah dipengaruhi oleh partai atau calon tertentu tanpa proses berpikir

⁴ Alif Muhammad Zakaria and Mauliyana Rachmat, "Membangun Perekonomian Desa Berkelanjutan Melalui Manajemen Kinerja Berbasis Community Empowerment," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 3, no. 1 (2021): 7–13, <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.65>.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016.

⁶ Fakhri Amrullah et al., "Literasi Politik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota Samarinda,".

⁷ Al Musa Karim, Adi Wibawa, and Puguh Toko Arisanto, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (December 2020): 116–31, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>.

⁸ Sutarna, et al. "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu Political Education for Novice Voters: Electoral Integrity Initiative" 3, no. 1 (2023): 38–46.

⁹ Ilham Mahmud Farikiansyah et al., "2024, Pages 6512-6523 Journal of Education Research," *Journal of Education Research*, vol. 5, n.d.

secara kritis. Kondisi ini dapat mengakibatkan penggiringan opini dan pembentukan persepsi yang belum tentu objektif pada kalangan pemilih pemula.¹⁰ Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat baik kalangan pemilih pemula, pemilih dewasa, maupun lanjut usia mempunyai pemahaman yang baik tentang pentingnya partisipasi di dalam pemilu.

Diagram 1. Tingkat Partisipasi Pilkada di Kota Magelang



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Magelang

Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi mencapai 57,33%. Kemudian, meningkat signifikan menjadi 77,4% pada tahun 2020, dan mencapai 79,3% pada Pilkada 2024.¹¹ Meskipun peningkatan dari 2020 ke 2024 tidak sebesar sebelumnya, tren ini tetap menunjukkan keberhasilan strategi sosialisasi dalam menjaga keterlibatan masyarakat secara konsisten. Sosialisasi politik oleh KPU merupakan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf c, yang menyebutkan bahwa KPU bertugas memberikan pendidikan politik kepada pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, KPUD wajib menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik, termasuk bagi pemilih muda, agar memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu. Strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Magelang, memuat empat bentuk yaitu langsung, tidak langsung, partisipatif, dan edukatif. Strategi ini diimplementasikan melalui pendekatan digital, komunitas, serta program berbasis usia dan kebutuhan pemilih.

Keterbaruan penelitian mengenai strategi sosialisasi menyoroti pentingnya komunikasi politik yang efektif serta pelibatan langsung masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilu sebagai faktor utama dalam mendorong partisipasi. Santari mengemukakan bahwa partisipasi pemilih dapat dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas peran masyarakat sipil dalam

¹⁰ Mohammad Ichlas El Qudsi and Ilham Ayatullah Syamtar, "Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 4, no. 2 (2020): 167, <https://doi.org/10.24853/pk.4.2.167-185>.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Magelang, "Data Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Magelang Tahun 2015, 2020, Dan 2024," 2024, n.d.

proses sosialisasi.¹² Sementara itu, pada tingkat bawah, peningkatan partisipasi juga dipengaruhi oleh adanya alih kepercayaan dan kepemilikan masyarakat lokal terhadap organisasi pendamping yang terlibat dalam proses pemilu.¹³ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu sangat penting karena dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa apa pun yang mereka lakukan akan diperiksa dan dievaluasi secara adil dan transparan.¹⁴ Hal serupa juga diungkapkan oleh Gustrinanda, yang menekankan bahwa kepercayaan publik dapat mendorong partisipasi aktif dalam pemilu¹⁵. Situasi ini mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada.

Wawancara pra-riset menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih muda di Kota Magelang dalam dua pemilihan terakhir, termasuk Pilkada 2024, merupakan hasil strategi sosialisasi yang secara khusus diarahkan kepada kelompok usia muda. Vica Vitri Utami dari KPU Kota Magelang menjelaskan bahwa generasi muda memiliki pola konsumsi informasi berbeda, sehingga diperlukan komunikasi yang selaras dengan dunia digital mereka; peningkatan partisipasi pada dua pemilu terakhir menjadi bukti efektivitas pendekatan kreatif dan adaptif tersebut. Handoko dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi menambahkan bahwa metode tradisional seperti baliho dan selebaran tidak lagi memadai, sehingga KPU mengintegrasikan media sosial, kolaborasi komunitas muda, duta pemilu, serta produksi konten digital partisipatif untuk menjadikan pemilih muda aktor aktif dalam diseminasi informasi.

Pendekatan ini dirancang agar konten lebih relevan dengan estetika digital generasi Z dan milenial yang mengutamakan visual dinamis dan format interaktif, selaras dengan temuan Praduta (2024) mengenai pentingnya memahami preferensi media pemilih muda. Secara keseluruhan, kombinasi media digital, kreativitas konten, dan partisipasi komunitas terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi konvensional, dan temuan ini sejalan dengan perspektif budaya politik Islam Bachtiar Effendy yang menekankan perlunya komunikasi politik yang inklusif, adaptif, dan mampu merangkul keragaman masyarakat.

Keterangan dari kedua narasumber sebelumnya menunjukkan bahwa strategi sosialisasi KPU Kota Magelang benar-benar disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan pemilih muda. Alih-alih hanya menyampaikan informasi satu arah, KPU berusaha menjalin komunikasi yang lebih partisipatif dan menyenangkan, sehingga partisipasi tidak hanya menjadi kewajiban,

¹² “Demokrasi Berkeadilan Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Mataram Dalam Pilkada Serentak 2024,”

¹³ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51,

¹⁴ Ketut Andita et al., “Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM,” *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37–46,

¹⁵ Rio Gustrinanda, “Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu,” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 3, no. 1 (2023): 100–106, <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>.

tetapi juga bagian dari kesadaran dan antusiasme generasi muda. Dalam konteks keilmuan, penelitian mengenai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, belum banyak kajian yang menelaah strategi sosialisasi KPU dalam bingkai budaya politik Islam, khususnya di wilayah dengan karakter religius kuat seperti Kota Magelang. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi pijakan utama penelitian ini.

Hal ini mendorong penulis untuk menelaah, memahami, dan menjelaskan bagaimana strategi KPU Kota Magelang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat selama dua Pilkada sebelumnya dan menjelaskan bagaimana melihat hal tersebut dalam kaca mata budaya Islam yang konvensional, penekanan terhadap budaya politik Islam konvensional didasarkan pada mayoritas pemilih di Kota Magelang memiliki latar belakang Islam yang normative berdasarkan “Ahlusunah Wal Jamaah”, sehingga beberapa partai politik yang memiliki latar belakang tersebut memiliki sebuah kekuatan tersendiri karena didukung oleh massa yang sangat banyak di Kota Magelang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penjelasan mendalam dan bersifat deskriptif.¹⁶ Metodologi penelitian ini sifatnya deskriptif, dengan menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati, dengan pendekatan yang melihat keseluruhan situasi individu secara menyeluruh.¹⁷ Wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Metode lain yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yakni penentuan narasumber penelitian yang selaras dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada perwakilan anggota KPU, Bagian Sosdiklih, Barmas, dan SDM serta bagian Perencanaan, Data dan Informasi dengan menggunakan total tiga narasumber.

Dalam penelitian ini, data diolah dan diurutkan menggunakan teknik analisis Miles & Huberman, yang membagi analisis data kualitatif menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi atau kondensasi data, di mana data yang sudah dikumpulkan disaring dan dipilih agar menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan makna penting. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif, sehingga memudahkan pemahaman pola dan juga hubungan antar data. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti menarik interpretasi berdasarkan data yang telah disajikan sekaligus memeriksa konsistensi temuan.¹⁸

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁷ “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1 Oleh Ivanovich Agusta,” n.d.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Formulasi Strategi Sosialisasi KPU

Dengan luas wilayah 18,12 km² dan posisi yang strategis di jalur Semarang–Yogyakarta, Kota Magelang merupakan kota kecil dengan karakter sosial perkotaan yang dinamis (BPS, 2023). Komposisi penduduknya didominasi kelompok usia produktif, di mana sekitar 39,7% di antaranya berada pada rentang 17–35 tahun yang dikategorikan sebagai pemilih muda. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024 menunjukkan total 97.825 pemilih, dengan 40% pemilih muda, 37% pemilih dewasa, dan 23% pemilih lanjut usia, yang tersebar relatif merata di tiga kecamatan. Kondisi demografis tersebut membentuk konteks strategis bagi KPU Kota Magelang dalam merumuskan pendekatan sosialisasi pemilu (BPS Kota Magelang, 2023).

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Magelang mencapai 121.137 jiwa, dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok usia terbanyak, yakni sekitar 39,7% dari total pendudu adalah kelompok usia 17–35 tahun yang tergolong sebagai pemilih muda.¹⁹ Hal ini menggambarkan besarnya daya pilih kaum muda dalam Pilkada. Gambaran lebih rinci mengenai sebaran usia dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Table 1 Daftar Pemilih Tetap Kota Magelang Tahun 2024

Kecamatan	Pemilih Muda (17–30 Tahun)	Pemilih Dewasa (31–55 Tahun)	Pemilih Lanjut Usia (56+ Tahun)	Jumlah Total Pemilih
Magelang Utara	12.953 (40%)	12.100 (37%)	7.732 (23%)	32.785
Magelang Tengah	13.325 (40%)	12.411 (37%)	7.894 (23%)	33.630
Magelang Selatan	12.840 (40%)	11.949 (37%)	7.621 (23%)	32.410
Total	39.118 (40%)	36.460 (37%)	23.247 (23%)	97.825

Sumber: KPU Kota Magelang, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 97.825 pemilih terdaftar, yang dimana telah terbagi rata di tiga kecamatan. Distribusi usia pemilih menunjukkan bahwa lebih dari 40% DPT adalah pemilih muda (17–30 tahun), sedangkan pemilih yang tersisa adalah dewasa (31–55 tahun) dan lansia (56 tahun ke atas).²⁰ Komposisi ini menjadi pertimbangan strategis yang penting bagi KPU dalam merancang pendekatan sosialisasi pemilu yang tepat.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Magelang, “Statistik Daerah Kota Magelang 2023,” 2023.

²⁰ Magelang, “Data Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Magelang Tahun 2015, 2020, Dan 2024.”

Dengan latar belakang demografi tersebut, KPU perlu mempertimbangkan kembali karakteristik usia pemilih ketika mengembangkan strategi. Karakteristik usia pemilih menjadi hal yang sangat diperhatikan, interpretasi tersebut senada dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ambardi yang menjelaskan bahwa strategi dengan menitikberatkan pada usia demografi akan memunculkan kejelasan poin yang ditekankan dalam melaksanakan kampanye politik.²¹ Strategi berbasis digital menjadi ujung tombak dalam menjangkau pemilih muda, karena kelompok ini cenderung lebih akrab dengan teknologi dan aktif di media sosial. Sementara pendekatan konvensional tetap diterapkan untuk menasar kelompok usia dewasa dan lansia yang cenderung lebih nyaman dengan komunikasi langsung. Penjelasan ini dikuatkan melalui wawancara bersama Vica Vitri Utami, anggota Divisi Sosdiklih, Barmas, dan SDM KPU Kota Magelang, yang menyatakan:

"Kita tegaskan bahwa saat ini kita masuk di era generasi milenial dan generasi Z ya, jadi pendekatan tidak bisa secara konvensional dalam memberikan edukasi politik khususnya. Oleh karena itu kita selalu menerapkan pendekatan dengan basis digital. Namun disisi yang lain kita juga tetap memperhatikan para pemilih dewasa dan orang tua ya mbak"

"Pastinya kita bedakan ya mbak, sosialisasi untuk kaula muda dan orang tua kita menggunakan pendekatan yang berbeda begitu"

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa untuk menjangkau masyarakat secara luas, KPU Kota Magelang melakukan pendekatan yang bersifat segmentasi, yaitu menyesuaikan metode sosialisasi berdasarkan tingkat pemahaman dan karakteristik dari masing-masing kelompok usia. Bagi masyarakat yang melek dengan teknologi digital, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pemahaman politik, sedangkan untuk pemilih dewasa dan juga lansia, dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu secara langsung dan tatap muka melalui forum-forum yang ada di masyarakat.

Temuan ini selaras apabila Ditinjau dari perspektif teori budaya politik Islam sebagaimana dikembangkan Effendy, formulasi strategi KPU ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai dalam konteks modern. Effendy menjelaskan bahwa budaya politik Islam berkembang ketika institusi mampu menyesuaikan nilai-nilai dasar dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks Kota Magelang, pendekatan digital kepada pemilih muda mencerminkan aspek adaptif budaya politik Islam terhadap perkembangan teknologi, sementara pendekatan tatap muka kepada pemilih dewasa dan lansia selaras

²¹ Kuskridho Ambardi, "Faktor Demografi Dalam Strategi Elektoral Pilkada : Demographic Analysis In Indonesian Local Elections," *Populasi* 24 (2016): 1–22.

dengan nilai-nilai komunal yang masih kuat dalam masyarakat Muslim lokal. Dengan kata lain, strategi KPU mencerminkan integrasi antara inovasi teknologi dan pendekatan berbasis kedekatan sosial yang menjadi ciri budaya politik Islam di tingkat praksis.

Dalam konteks Pilkada 2024, strategi berbasis teknologi digunakan untuk menjawab tantangan rendahnya keterlibatan dan literasi politik, terutama di kalangan pemilih muda. Pendekatan digital ini dipandang mampu menjangkau audiens lebih luas dan relevan dengan pola konsumsi informasi generasi saat ini. Hal ini sejalan dengan temuan Sugara dkk. yang menekankan bahwa pendekatan teknologi dalam edukasi politik dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di era digital.²²

2. Implementasi Pendekata Digital dan Partisipatif

Media digital seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan TikTok berperan strategis dalam sosialisasi politik karena mampu menjangkau berbagai kelompok usia melalui pesan singkat, visual menarik, dan format interaktif. Konten kreatif—seperti video edukasi, infografis, kampanye visual, dan siaran langsung—terbukti meningkatkan keterlibatan pemilih sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai prosedur dan urgensi pemungutan suara. Temuan Praduta (2024) menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi pemilu pada era digital bergantung pada perencanaan berbasis data demografis serta penyesuaian konten dengan karakteristik pemilih muda, di mana narasi imajinatif dan visual dinamis lebih menarik dibandingkan metode konvensional. Sejalan dengan itu, KPU Kota Magelang menerapkan pola komunikasi digital kolaboratif bersama organisasi lokal dan konten kreator untuk mengoptimalkan jangkauan kepada pemilih pemula dari generasi Z dan milenial.²³

Pada tingkat implementasi, KPU Kota Magelang tidak hanya berfokus pada media digital, tetapi juga menata strategi berdasarkan segmentasi demografis sebagai bentuk penyesuaian terhadap heterogenitas pemilih. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan luring di tingkat kecamatan, PKK, Karang Taruna, pertemuan RT/RW, serta forum komunitas khusus seperti mahasiswa dan penyandang disabilitas. Untuk pemilih muda yang jumlahnya mendominasi daftar pemilih tetap (DPT), KPU memanfaatkan kanal Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp sebagai media komunikasi dua arah yang selaras dengan pola konsumsi informasi generasi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan

²² Harry Sugara, Fitri Mutmainnah, and Della Nor Safitri, "Pendidikan Politik Lintas Generasi Dalam Membangun Partisipasi Politik Menghadapi Sukses Tahun Politik," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. Jati 2021 (2024): 118–28.

²³ Ananda Yayang Praduta, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral Dissertation, IPDN)," *Doctoral Dissertation, IPDN* 15, no. 1 (2024): 37–48.

kemampuan KPU dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika teknologi yang dekat dengan kehidupan pemilih muda.

Wawancara dengan Handoko, anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Magelang, memperkuat temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa strategi sosialisasi memang dibedakan menurut karakteristik usia, di mana pemilih dewasa dan lansia lebih responsif terhadap interaksi langsung. Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan *hibrida (daring–luring)* agar sosialisasi tetap inklusif dan merata. Informasi ini juga sejalan dengan data arsip KPU Kota Magelang yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah merumuskan rencana komunikasi terpadu untuk mengakomodasi perbedaan preferensi komunikasi antar generasi.

Penggunaan metode luring seperti forum warga, penyuluhan desa, dan pemasangan alat peraga kampanye menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih yang memiliki keterbatasan akses digital atau kurang akrab dengan teknologi, terutama pemilih lanjut usia. Sementara itu, metode daring digunakan untuk mempercepat distribusi informasi kepada kelompok yang lebih literat secara digital. Pendekatan ganda ini menunjukkan kemampuan KPU dalam memodifikasi strategi komunikasi secara adaptif, sesuai dengan kondisi demografis pemilih di Kota Magelang. Secara konseptual, langkah ini sejalan dengan pandangan Effendy mengenai budaya politik Islam, yang menekankan pentingnya komunikasi politik yang inklusif, partisipatif, serta menghargai keragaman sosial sebagai fondasi penguatan demokrasi.

Keterbatasan akses serta kemampuan pemilih lanjut usia dalam menggunakan media digital secara mandiri, serta kecenderungan mereka untuk memahami informasi melalui interaksi sosial secara langsung, menjadi alasan utama diterapkannya pendekatan ganda ini. Temuan ini sekaligus menggambarkan bagaimana KPU Kota Magelang mampu memodifikasi strategi sosialisasinya agar sesuai dengan beragam karakteristik demografi pemilih.

3. Alokasi Sumber Daya dan Kolaborasi Masyarakat

Dalam kerangka teori strategi Chandler, alokasi sumber daya didefinisikan sebagai tahapan penyesuaian struktur organisasi dan pendayagunaan aset untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan.²⁴ KPU Kota Magelang menerjemahkan tahap ini melalui perencanaan dan pemanfaatan anggaran, tenaga kerja, serta jejaring kemitraan demi memastikan keberhasilan sosialisasi pemilu yang inklusif. Dari sisi anggaran, KPU Kota Magelang didukung oleh dana operasional yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi

²⁴ Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*.

Umum (DAU). Namun, untuk memperluas jangkauan dan efektivitas, KPU juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi ini meliputi komunitas pemuda, organisasi masyarakat sipil, media lokal (radio, surat kabar, dan portal daring), serta institusi pendidikan melalui program-program seperti KPU Mengajar.

Sumber daya manusia dimobilisasi melalui pelibatan KPPS, PPK, dan relawan demokrasi (relasi) yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga bertindak sebagai agen diseminasi informasi dan nilai-nilai demokrasi. Mereka menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi politik, khususnya menjelang hari pemungutan suara. Strategi juga disesuaikan berdasarkan segmen usia pemilih. Untuk pemilih dewasa dan lanjut usia, KPU menerapkan pendekatan luring dengan menyelenggarakan kegiatan tatap muka, seperti penyuluhan di tingkat kecamatan, forum PKK, Karang Taruna, serta pertemuan RT/RW. Pendekatan ini sangat relevan bagi kelompok yang cenderung belum terbiasa dengan media digital, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau tingkat partisipasi rendah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Solissa & Lestaluhu, yang menunjukkan bahwa diskusi kelompok dan forum warga efektif dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat non-digital.

Sementara itu, untuk menjangkau pemilih muda yang lebih akrab dengan teknologi, KPU mengoptimalkan saluran digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Generasi ini dinilai lebih responsif terhadap konten visual dan interaktif. Karena itu, KPU Kota Magelang menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti lomba videografi, pelatihan pembuatan konten, hingga pemberian perlengkapan kepada kader sosialisasi agar dapat memproduksi konten yang edukatif dan menarik. Upaya ini diperkuat melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan media sosial, termasuk sesi bersama akademisi Swita Amallia Hapsari yang menekankan pentingnya kualitas materi digital dalam mendukung pendidikan politik.

Lebih lanjut, strategi KPU tidak hanya mengandalkan aspek edukatif, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan kultural. Program seperti *KPU Goes to School/Campus* menyatukan literasi digital dengan pendidikan formal, sementara pelibatan organisasi seni dan budaya dalam parade maskot “Si Randu” dirancang untuk menarik perhatian publik secara visual dan emosional. Pendekatan ini menjadikan pesan demokrasi lebih mudah diterima masyarakat luas. Upaya-upaya tersebut mencerminkan pemanfaatan alokasi sumber daya secara strategis dan fleksibel. Studi lain menekankan bahwa pelibatan komunitas pemuda dan pemanfaatan data pemilih melalui materi digital

merupakan elemen kunci dalam keberhasilan sosialisasi.²⁵ Selaras dengan hal tersebut, KPU Kota Magelang mengembangkan kombinasi empat pendekatan utama: digital, komunitas, segmentatif, dan tatap muka. Setiap pendekatan diterapkan sesuai dengan profil pemilih yang ditargetkan.

Menurut teori Chandler, strategi ini mencerminkan implementasi alokasi sumber daya yang efektif, di mana media digital digunakan untuk menarik pemilih muda, sedangkan komunitas, pendidikan, dan keterlibatan langsung menjadi kekuatan utama untuk menjangkau kelompok usia dewasa dan lansia. Tinjauan pustaka dan laporan praktik menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan literasi politik dan partisipasi pemilih. Hal ini dibuktikan dengan capaian partisipasi pemilih Kota Magelang sebesar 79,16% yang merupakan salah satu angka tertinggi di Jawa Tengah. Dengan demikian, strategi alokasi sumber daya yang diterapkan KPU Kota Magelang dapat menjadi model sosialisasi demokrasi yang inklusif, adaptif, dan kontekstual di berbagai wilayah lainnya.

4. Dimensi Budaya Politik Islam dalam Praktik Sosialisasi

Budaya politik Islam dalam penelitian ini dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu Islam sebagai sumber nilai, demokrasi sebagai wadah politik, dan dimensi kultural serta institusional yang membentuk praktik politik masyarakat Muslim Kota Magelang.²⁶ Ketiga aspek tersebut menjadi landasan analitis untuk menafsirkan bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang tidak hanya bekerja di ranah administratif, tetapi juga menyentuh kesadaran moral, sosial, dan kultural masyarakat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dijalankan KPU tidak bersifat teknokratis semata misalnya hanya memaparkan jadwal, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara, melainkan juga dibangun melalui pemahaman terhadap konteks sosial-keagamaan masyarakat kota Magelang yang mayoritas Muslim.

Berdasarkan hasil observasi substansi kegiatan sosialisasi, KPU Kota Magelang tidak sekadar menyampaikan informasi teknis mengenai tahapan Pilkada, tetapi juga menekankan urgensi moral dari partisipasi politik. Kesadaran untuk datang ke TPS dipresentasikan bukan hanya sebagai hak politik, tetapi juga sebagai tindakan tanggung jawab sosial yang turut berperan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan demokratis. Cara penyampaian seperti ini memperlihatkan bahwa strategi sosialisasi tersebut bekerja dalam kerangka Islam sebagai sumber nilai, suatu kerangka yang menghubungkan

²⁵ Praduta, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral Dissertation, IPDN)."

²⁶ Bahtiar Effendy, "Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.," 2003.

partisipasi politik dengan prinsip-prinsip etis dalam ajaran Islam. Nilai-nilai normatif seperti *'adl* (keadilan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *ukhuwah* (solidaritas) menjadi landasan yang tampak mengarahkan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi tersebut. *Pertama*, prinsip *'adl* tercermin dari upaya KPU memastikan pemerataan akses informasi pemilu bagi seluruh golongan masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bermakna kesetaraan prosedural, tetapi juga kepekaan terhadap kebutuhan informasi yang berbeda dari tiap kelompok, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara sadar dan informasional.

Kedua, prinsip *mas'uliyah* tampak dari pesan-pesan sosialisasi yang menekankan bahwa memilih merupakan sebuah amanah yang melekat pada diri setiap warga negara. KPU Kota Magelang kerap menggarisbawahi bahwa keputusan politik individu akan berdampak pada kualitas kepemimpinan daerah dan keberlanjutan pembangunan. Tindakan memilih dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap masa depan kolektif. Nilai tanggung jawab ini sangat dekat dengan etika sosial Islam, yang tidak hanya memandang individu sebagai pemilik hak, tetapi juga pemikul kewajiban etis bagi kemaslahatan bersama. *Ketiga*, prinsip *ukhuwah* menyokong metode pelibatan komunitas yang digunakan KPU dalam sosialisasi. Kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok pemuda masjid, dan komunitas-komunitas lokal lainnya membantu memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga proses politik yang damai dan inklusif.

Sampai disini dapat diinterpretasikan bahwa pendekatan berbasis komunitas ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu bukan hanya proses komunikasi politik, tetapi juga sebuah upaya memperkuat jaringan sosial yang menjadi inti kehidupan masyarakat Muslim. Nilai *ukhuwah* di sini berfungsi sebagai perekat sosial yang menjamin bahwa partisipasi politik berjalan secara harmonis dan menghindari fragmentasi sosial. Dengan demikian, strategi sosialisasi KPU Kota Magelang dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi juga sebagai upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan tradisi etis Islam. Hal ini memperlihatkan kesesuaian dengan aspek kedua budaya politik Islam, yaitu demokrasi sebagai wadah politik.

Pendekatan KPU terbukti membuka ruang bagi praktik demokrasi partisipatif yang bersifat deliberatif, sejalan dengan prinsip *syura* (*musyawarah*) dalam Islam. Pemilih diajak bukan hanya untuk menggunakan hak suara, tetapi juga untuk membaca situasi,

menentukan pilihan secara bertanggung jawab, dan menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam struktur politik yang lebih besar. Temuan ini juga selaras dengan berbagai penelitian mengenai praktik komunikasi politik organisasi Islam di Indonesia. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa organisasi seperti NU, Muhammadiyah, FPI, hingga PA 212 memanfaatkan media sosial dan ruang publik sebagai medium komunikasi politik yang memadukan dakwah, identitas keislaman, dan mobilisasi publik.

Pendekatan digital yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berdialog dengan teknologi modern tanpa kehilangan etika dan moderasi. KPU Kota Magelang berada dalam lanskap sosial yang sama, sehingga penguatan nilai keislaman di ruang publik digital, jika dilakukan secara moderat dan nonpartisan, menjadi kompatibel dengan strategi sosialisasi KPU. Lebih jauh lagi, dinamika budaya politik Islam pada era digital menunjukkan bahwa masyarakat Muslim, termasuk kelompok yang cenderung konvensional, bersedia menerima inovasi selama pendekatan tersebut tetap menghormati nilai normatif Islam dan berpijak pada etika sosial.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas tetap dapat ditransformasikan secara kontekstual untuk menjawab tantangan zaman. Dalam konteks Kota Magelang, strategi sosialisasi KPU dapat dilihat sebagai bagian dari proses transformasi tersebut, yakni menghadirkan politik sebagai ruang etis sekaligus ruang partisipatif. Strategi sosialisasi KPU Kota Magelang bukan hanya aktivitas administratif, tetapi juga bagian dari pembentukan budaya politik Islam yang inklusif, adaptif, dan bernilai etis, yang menyatukan aspek nilai, demokrasi, serta kultural-institusional dalam satu praktik politik yang relevan bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Pendekatan dengan nilai Islam dalam sosialisasi politik juga didukung oleh penelitian yang mengungkap bahwa ormas Islam di Indonesia (seperti NU, Muhammadiyah, FPI, dan PA 212) menggunakan media sosial sebagai strategi komunikasi politik yang menggabungkan identitas keislaman dan mobilisasi publik, pendekatan digital yang selaras dengan nilai-nilai moderat dan dakwah mampu meningkatkan partisipasi politik umat Islam.²⁷

Budaya politik Islam kontempore turut bertransformasi meskipun dalam target segmenya adalah masyarakat konvensional, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tetap dapat diartikulasikan secara dinamis dan kontekstual dalam menghadapi

²⁷ Sebagus Pipo Mahendra et al., "Islamic Political Communication In The Digital Era : A Study On The Media Social Islamic Mass Organizations of Indonesia," *Journal of Political Islam* 1, no. 1 (2025).

perubahan sosial-politik, termasuk di era digital. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa komunitas Muslim konvensional tidak tertutup terhadap inovasi selama pendekatan tersebut tetap menghormati nilai-nilai normatif Islam dan dipandu oleh prinsip etika sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Pilkada Kota Magelang 2024 yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi di Jawa Tengah, yakni 79,16%, tidak lepas dari strategi sosialisasi adaptif KPU Kota Magelang. KPU menyikapi berbagai permasalahan demografi yang didominasi oleh generasi milenial dan Generasi Z dengan memadukan taktik komunikasi luring dan daring serta melakukan segmentasi strategi komunikasi berdasarkan karakteristik usia pemilih (muda, dewasa, dan lanjut usia). Teknik ini sesuai dengan kerangka teori Chandler yang menggabungkan formulasi berbasis data jangka panjang, penggunaan berbagai taktik komunikasi, dan alokasi sumber daya melalui kolaborasi multipartai. Pemanfaatan media digital seperti Instagram dan Tiktok yang dipadukan dengan pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW dan program kemasyarakatan seperti "KPU Goes to School" memperluas jangkauan pesan demokrasi secara inklusif dan berdampak, sehingga dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Referensi

- Ambardi, Kuskridho. Ambardi, K. (2016). Faktor demografi dalam strategi elektoral pilkada: *Demographic analysis in Indonesian local elections*. *Populasi*, 24, 1–22.
- Amrullah, F.. Literasi politik Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Samarinda. *Jurnal Professional*, 12.
- Andita, K., & Lestari, P. (2021). Semakin meningkatnya persentase golput khususnya di kala pandemi: Hak golput bagi rakyat menurut perspektif hukum dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37–46.
- Lestari, A. W., (2023). Kepemimpinan visioner dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(1), 19–35. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i1.150>
- Bachtiar, B. S. (n.d.). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. MIT Press.
- Databoks. (2024). Mayoritas penduduk Kota Magelang pada 2024 adalah usia produktif. <https://databoks.katadata.co.id>
- Demokrasi berkeadilan: Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam pilkada serentak 2024. (n.d.).
- Effendy, B. (2003). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51–60. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>

- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Karim, A. M., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2020). Partisipasi politik pemilih pemula di media sosial: Studi deskriptif tingkat dan pola politik partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta melalui Instagram tahun 2019. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang. (2023). *Statistik daerah Kota Magelang 2023*.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. (2024). *Data partisipasi pemilih Pilkada Kota Magelang tahun 2015, 2020, dan 2024*.
- Mahendra, S. P., Saudin, B. M., Loeca, H., Yazid, M., & Busthomi, A. (2025). Islamic political communication in the digital era: A study on the social media of Islamic mass organizations in Indonesia. *Journal of Political Islam*, 1(1).
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, L. M., Faiqah, F. N., & Al Gufron, M. A. (n.d.). *Journal of Education Research*, 5, 6512–6523.
- Praduta, A. Y. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral dissertation, IPDN). *IPDN Journal*, 15(1), 37–48.
- Qudsi, M. I. E., & Syamtar, I. A. (2020). Instagram dan komunikasi politik generasi Z dalam pemilihan presiden 2019. *Perspektif Komunikasi*, 4(2), 167–185. <https://doi.org/10.24853/pk.4.2.167-185>
- Halihah, S. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 78–93.
- Solissa, F. Pendidikan politik digital dan tradisional: Dinamika peran pemuda dalam demokrasi lokal di Indonesia. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.30598/populis.19.1.16-30>
- Sugara, H., Mutmainnah, F., & Safitri, D. N. (2024). Pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik menghadapi suksesi tahun politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 118–128.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutarna, I. T., Subandi, A., & Zitri, I. (2023). Pendidikan politik untuk pemilih pemula: Inisiatif untuk integritas pemilu. *Political Education Journal*, 3(1), 38–46.
- Agusta, I. *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*.
- Zakaria, A. M., & Rachmat, M. (2021). Membangun perekonomian desa berkelanjutan melalui manajemen kinerja berbasis community empowerment. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.65>